

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) - 2017



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BERAU**

Jalan Dr. Murjani no.92 Tanjung Redeb – Berau 77311

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau dapat diselesaikan dengan baik, tepat sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Penyusunan LAKIP ini berpedoman pada PEPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003

Dengan adanya LAKIP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau dapat tergambar dengan jelas sehingga dapat memudahkan bagi para stakeholder untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini, kami ucapkan terima kasih.

Tanjung Redeb, 4 Maret 2018

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Kabupaten Berau,


Abriroh Fiarso, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630402 199203 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. DASAR HUKUM	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	3
C. STRUKTUR ORGANISASI	4
D. KEPEGAWAIAN	7
E. SARANA DAN PRASARANA.....	8
F. ADMINISTRASI	9
G. ASPEK KEUANGAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. VISI DAN MISI	11
B. TUJUAN DAN SASARAN	12
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	13
D. PROGRAM DAN KEGIATAN	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. EVALUASI KINERJA	21
B. PENJELASAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	26
C. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di dalam pasal 55 ayat 5 mengatakan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah, di dalam Pasal 10 Ayat (1) mengatakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau sebagai Lembaga Teknis yang membantu Kepala Daerah, wajib untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan lebih lanjut dalam penggunaan anggaran.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 ini peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 114);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 3) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 11) Permendagri Nomor: 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor: 7 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau.
- 13) Peraturan Bupati Berau Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Rincian tugas pokok, dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau adalah tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dengan memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.

1. Pembentukan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau merupakan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Berau yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Berau.

Dasar Pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau adalah Peraturan Daerah Kabupaten Berau nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau dan Peraturan Bupati Berau Nomor 56 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau.

2. Tugas Pokok

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan

Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah lain.

3. Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau terdiri dari : 1 (satu) Kepala Dinas dan Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 12 (dua belas) Kepala Seksi dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, membawahi :
 - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja
 - b. Seksi Perluasan Tenaga Kerja
 - c. Seksi Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna

4. Bidang Pelatihan dan Produktifitas, membawahi :
 - a. Seksi Pelatihan dan Pemagangan
 - b. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi
 - c. Seksi Pengembangan Produktifitas
5. Bidang Hubungan Industrial, membawahi :
 - a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
 - c. Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja
6. Bidang Transmigrasi, membawahi :
 - a. Seksi Pemukiman dan Penempatan
 - b. Seksi Pembinaan sosial Ekonomi
 - c. Seksi Pembinaan sosial Budaya

D. KEPEGAWAIAN

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau per tanggal 31 Desember 2017 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 59 orang terdiri dari PNS sebanyak 53 Orang dan Non-PNS sebanyak 6 orang (update thn 2017), dengan rincian :

- Pejabat struktural = 21 Orang
- Staf Pelaksana = 21 Orang
- Pegawai Tidak Tetap (PTT) = 3 Orang
- Pegawai Harian Lepas Tenaga Pembantu = 9 Orang

Berdasarkan kualifikasi pendidikannya dari 48 orang pegawai (PNS dan Non PNS update thn 2017) tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Sekolah Dasar (SD)	0 Orang
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	0 Orang
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	21 Orang
4	Deploma III	3 Orang
5	Sarjana (S.1)	23 Orang
6	Pasca Sarjana (S2)	1 Orang
	Jumlah	48 Orang

Berdasarkan kualifikasi jenis kelaminnya dari 48 orang pegawai (PNS dan Non PNS update thn 2017) tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
	Eselon			
1.	Eselon II	1	0	1
2.	Eselon III	4	0	4
3.	Eselon IV	10	4	14
	Jumlah	15	4	18
	Pejabat Fungsional			
4		0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Staf Pelaksana			
5	Staf	7	10	17

	Jumlah	7	10	17
	PTT			
6	Honorer	2	1	3
	Jumlah	2	1	3
	THL-TB & PMT			
7	THL-TB	6	3	9
	Jumlah	6	3	9
	Jumlah Total	30	18	48

Berdasarkan Kepangkatan dan golongannya dari 48 orang yang berstatus PNS dapat dirinci sebagai berikut :

No	Pangkat / Golongan Ruang (Update Thn 2017)	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Pembina Utama Muda / IV-C	1
2	Pembina Tingkat I / IV-B	3
3	Pembina / IV-A	1
4	Penata Tk I / III-D	8
5	Penata / III-C	11
6	Penata Muda Tk. I / III-B	4
7	Penata Muda / III-A	1
8	Pengatur Tk. I / II-D	
9	Pengatur / II-C	4
10	Pengatur Muda Tk. I / II-B	3
11	Pengatur Muda / II-A	
12	Juru/ I-C	
	Jumlah	48 orang

E. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut masih perlu ditingkatkan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan Visi Misi Bupati Berau dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi .Adapun sarana dan prasarana tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama barang	Jumlah	Kondisi Lengkap/Kurang /Cukup	Ket.
1.	Kantor Badan	2 Unit	2 Cukup Baik	Layak
2.	Komputer PC/ Laptop/Notebook	14 Unit	Kurang 3 Unit Baik 11 unit	Perlu penambahan Pengadaan
3.	Kend.Roda 4	2 Unit	Lengkap/Cukup	Perlu penambahan Pengadaan
5.	Kend. Roda 2	24 Unit	Kurang layak 2 unit Baik 22 unit	Perlu penambahan Pengadaan
6.	Perlengkapan Kantor	6 Paket	Baik	Layak
7.	Alat Vidio Visual	1 Paket	Baik	Layak

F. ADMINISTRASI PEMERINTAH

Secara administrasi Kabupaten Berau terbagi menjadi 13 kecamatan. Adapun ketiga belas kecamatan tersebut adalah Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Sambaliung, Biduk-Biduk, Talisayan, Tubaan, Batu Putih, Lempake, Pulau Derawan, Maratua, Segah, Kelay dan Teluk Bayur. Dari kecamatan tersebut di atas terbentuk dari 10 kelurahan dan 100 kampung. Sedangkan jumlah rukun tetangga di Kabupaten Berau adalah 671 RT.

No.	Kecamatan	Kampung/ Kelurahan
1.	Kelay	14
2.	Talisayan	10
3.	Tabalar	6
4.	Biduk-Biduk	6
5.	Pulau Derawan	5
6.	Maratua	4
7.	Sambaliung	14
8.	Tanjung Redeb	6

9.	Gunung Tabur	11
10.	Segah	13
11.	Teluk Bayur	6
12.	Batu Putih	7
13.	Biatan	8
Jumlah		110

G. ASPEK KEUANGAN

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Berau sebesar **RP. 2.437.502.800,-** (*Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*) anggaran ini adalah untuk mengakomodir beberapa program kegiatan seperti berikut:

NO	Program	Keuangan (Rp.)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.209.977.550
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	23.750.000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	47.998.750
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	255.827.500
5.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	153.386.000
6.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	746.563.000
Jumlah Total Anggaran		2.437.502.800

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Dalam rangka menentukan arah yang akan dicapai dimasa mendatang, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau mempunyai Visi sebagai berikut :

"Mengembangkan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian secara menyeluruh, Produktif, Kompetitif, dan Sejahtera serta terpadu yang berorientasi pada terwujudnya Kabupaten Berau sebagai Daerah Pengembangan Agrobisnis dan Agrowisata"

2. Rumusan Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan *misi* yang akan dilaksanakan dalam kurung waktu tertentu. *Misi* tersebut merupakan kegiatan bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang meliputi Pencari Kerja, Perusahaan, Wirausahaan dan Transmigran. Rumusan misi sebagai upaya untuk mewujudkan visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :

1. Meningkatkan Pelayanan Pencari Kerja dan Informasi Pasar Kerja serta Kesempatan Kerja;
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktifitas Kerja
3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja serta meningkatkan Fungsi-fungsi Lembaga-lembaga Ketenagakerjaan.
5. Meningkatkan Penyiapan Pemukiman, Pembinaan Transmigrasi dan Pengembangan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas baik manajemen maupun administrasi yang akuntabel dalam fasilitas dan pelayanan dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- b. Pembangunan sinergisitas kebijakan, rencana program, pelaksanaan dan pengendalian antar unit kerja dan dengan Satuan Kerja/lembaga/sector-sektor terkait untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
- c. Peningkatan pelayanan, sarana informasi dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang transparan, cepat, akurat, dan akuntabel untuk menyediakan informasi dan pelayanan kesempatan kerja dan perluasan lapangan kerja bagi pencari kerja.
- d. Peningkatan kualitas dan produktivitas SDM di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, meningkatkan kualitas dan terwujudnya kemandirian manajemen penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan transmigran.
- e. Penciptaan ketenangan bekerja dan berusaha dan terwujudnya pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (*Independent*), professional dan seragam di Kalimantan Timur.
- f. Pelaksanaan pengembangan wilayah transmigrasi, transmigrasi regional dan transmigrasi local untuk menciptakan ketahanan nasional (Pangan dan Keamanan) dan menciptakan keunggulan potensi local guna meningkatkan daya saing local serta kesejahteraan masyarakat dan transmigran.

2. Sasaran

- a. Tersedianya SDM Aparatur yang berkualitas baik manajemen maupun administrasi yang akuntabel dalam fasilitas dan pelayanan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- b. Terciptanya sinergisitas kebijakan, rencana program, pelaksanaan dan pengendalian antar unit kerja dan dengan Satuan Kerja/lembaga/sector-sektor terkait untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
- c. Tersedianya sarana informasi dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang transparan, cepat, akurat, dan akuntabel untuk menyediakan informasi kesempatan kerja dan perluasan lapangan kerja bagi pencari kerja.
- d. Tersedianya kualitas dan produktivitas SDM dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, meningkatkan kualitas dan terwujudnya kemandirian manajemen penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi.
- e. Terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha serta trwujudnya pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri(*Independent*), professional dan seragam di Kalimantan Timur.
- f. Terwujudnya pelaksanaan pengembangan wilayah transmigrasi, transmigrasi regional dan transmigrasi local untuk menciptakan ketahanan nasional (Pangan dan Keamanan) dan menciptakan keunggulan potensi lokal guna meningkatkan daya saing lokal serta

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Strategi

a. Ketenagakerjaan

Strategi dibidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Penciptaan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah.
2. Peningkatan kinerja industri agar dapat meningkatkan daya serap tenaga kerja.
3. Pengembangan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja.
4. Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan.
5. Fasilitasi dan pengembangan lembaga kursus/pelatihan tenaga kerja.

6. Peningkatan peran serikat pekerja dalam fasilitasi perselisihan hubungan industrial.
7. Peningkatan keselamatan kerja melalui penyediaan sarana prasarana K3.

b. Ketrasmigrasian

Strategi dibidang ketrasmigrasian adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan MOU dengan daerah tujuan transmigrasi lainnya.
2. Peningkatan kerja sama dengan daerah tujuan transmigrasi dalam hal penyediaan sarana prasarana di lokasi transmigrasi.

2. Kebijakan

a. Ketenagakerjaan

kebijakan dibidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Menurunkan jumlah pengangguran melalui penempatan dan perluasan kesempatan kerja, dengan kegiatan prioritas kegiatan pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja.
2. Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja melalui peran serta dan partisipasi lembaga-lembaga pendidikan dalam penyiapan kualitas tenaga kerja.
3. Menurunkan jumlah perselisihan hubungan industrial dan kecelakaan kerja.

b. Ketrasmigrasian

kebijakan dibidang ketrasmigrasian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam transmigran.
2. Meningkatkan MOU lokasi calon Transmigran.

D. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2017

Dalam upaya tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana yang diinginkan, serta berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun anggaran 2017 menetapkan 6 (enam) Program dan 22 (dua puluh dua) Kegiatan dengan rincian anggaran sebagai berikut :

NO	PROGRAM dan KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.209.977.550
	Penyediaan jasa surat menyurat	8.050.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	230.065.800
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas-/operasional	133.020.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	109.988.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	9.375.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.500.000
	Penyediaan alat tulis kantor	22.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.300.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.500.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.592.000
	Penyediaan makanan dan minuman	17.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	220.869.750
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	30.000.000
	Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran	380.717.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	23.750.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	23.750.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	47.998.750
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	47.998.750

4	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	255.827.500
	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	255.827.500
5	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	153.386.000
	Penyusun Informasi Bursa tenaga kerja	103.386.000
	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	50.000.000
6	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	746.563.000
	Pendataan Penyuluhan, Pembentukan, Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Sarana Hubungan Industrial	287.106.000
	Penyuluhan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	191.001.000
	Peningkatan Fungsi-fungsi Lembaga Ketenagakerjaan dan syarat-syarat kerja	268.456.000
Jumlah		2.437.502.800

Adapun Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun anggaran 2017, adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor yang efektif dan efisien	Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	4 Bidang dan Sekretariat
2.	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan Gedung Kantor	Gedung Kantor
3.	Terwujudnya peningkatan kualitas penyusunan program, peningkatan kualitas hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran serta terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang tepat, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Disnakertrans - Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja serta laporan dan hasil evaluasi terkait dengan pelaksanaan program, anggaran dan akuntabilitas kinerja - Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu 	<p style="text-align: center;">100 %</p> <p style="text-align: center;">100 %</p> <p style="text-align: center;">100 %</p>

4.	Terwujudnya tenaga kerja siap pakai dan siap kerja	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi para Pencari Kerja : a. Pelatihan Menjahit b. Pelatihan Komputer	20 Orang 16 Orang
5.	Terwujudnya tingkat penyerapan lowongan kerja pada perusahaan	Pencari Kerja dan Perusahaan dalam wilayah Kabupaten Berau	Perusahaan di 13 Kecamatan
6.	Terwujudnya ketenagan kerja dan berusaha	a. Ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan b. Jumlah perusahaan yang melaksanakan memiliki peraturan pemerintah c. Jumlah perusahaan yang melaksanakan perjanjian kerja bersama d. Jumlah kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan e. Lembaga Kerjasama Bipartit f. Upah Minimal sama dengan UMK	Perusahaan di 13 Kecamatan 50 Perusahaan 50 Perusahaan 13 Kecamatan 50 Perusahaan 50 Perusahaan
7.	Terwujudnya pembinaan pembangunan transmigrasi kawasan	a. Jumlah KK transmigran yang mandiri	81 KK

2. Dukungan Anggaran Rencana Pembangunan Tahun 2018

Perencanaan pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun anggaran 2018, telah disusun dengan melalui tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan, Forum Koordinasi Pembangunan Tingkat Kabupaten dan Musyawarah Pembangunan Kabupaten. Berdasarkan hasil proses pembahasan setiap tahapan tersebut, maka perencanaan pembangunan pada tahun 2018 terdiri dari 8 (enam) Program dan 25 (dua puluh lima) Kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.180.555.000
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	225.339.000
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100.000.000
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	97.178.000
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.000.000
	- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	13.000.000
	- Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000
	- Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	16.700.000
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	39.000.000
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	9.350.000
	- Penyediaan makanan dan minuman	35.000.000
	- Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	187.800.000
	- Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	60.000.000
	- Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	362.688.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.000.000
	- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	5.000.000
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.955.000
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	4.955.000
4	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	109.234.000
	- Penyediaan dan Pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	109.234.000
5	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	363.000.000

	- Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	363.000.000
6	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	275.000.000
	- Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	80.000.000
	- Pengembangan kelembagaan produktivitas & Pelatihan Kewirausahaan	195.000.000
7	Program Perlindungan & Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	245.000.000
	- Pendataan, Penyuluhan, Pembentukan, Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Sarana HI	75.000.000
	- Penyuluhan & Penyelesaian Perselisihan HI	100.000.000
	- Peningkatan Fungsi - fungsi Lembaga ketenagakerjaan & Syarat - syarat kerja	70.000.000
8	Program Transmigrasi Regional	40.766.000
	- Penyuluhan Transmigrasi Regional	40.766.000
JUMLAH		2.223.510.000

Adapun Perjanjian Kerja Eselon II tahun anggaran 2018, adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor yang efektif dan efisien	Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	4 Bidang dan Sekretariat
2.	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan Gedung Kantor	Gedung Kantor
3.	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang dapat mengamalkan PP No. 53 dengan baik	Persentase tingkat kehadiran dan kedisiplinan berpakaian dinas	100 %
4.	Terwujudnya peningkatan kualitas penyusunan program, peningkatan kualitas hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran serta terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang tepat, transparan dan akuntabel	- Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Disnakertrans - Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja serta laporan dan hasil evaluasi terkait dengan pelaksanaan program, anggaran dan akuntabilitas kinerja	100 % 100 % 100 %

		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu - Peningkatan dalam nilai LkjIP 	60 buku
5.	Terwujudnya tenaga kerja siap pakai dan siap kerja	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi para Pencari Kerja	40 orang
6.	Terwujudnya tingkat penyerapan Tenaga Kerja pada perusahaan dan terwujudnya masyarakat yang mandiri	<ul style="list-style-type: none"> - Pencari Kerja dalam wilayah Kabupaten Berau - Pelaku Usaha Mandiri 	Perusahaan di 13 Kecamatan 60 orang
7.	Terwujudnya ketenangan kerja dan berusaha	<ul style="list-style-type: none"> • Ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan • Jumlah perusahaan yang melaksanakan memiliki peraturan pemerintah • Jumlah perusahaan yang melaksanakan perjanjian kerja bersama • Jumlah kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan • Lembaga Kerjasama Bipartit • Upah Minimal sama dengan UMK 	30 perusahaan
8.	Terwujudnya kawasan Transmigrasi yang Mandiri	Persentase KK transmigrasi yang mandiri	3 Kecamatan

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. EVALUASI KINERJA

Sumber pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Berau, sebesar RP. 2.437.502.800,- (*Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Evaluasi kinerja dimulai dengan Rencana Kerja Tahunan yang mencakup Perjanjian Kinerja SKPD dan Penetapan Capaian Kinerja SKPD dengan melampirkan Perjanjian Kinerja SKPD yang selanjutnya dilaksanakan secara berjenjang.

Pencapaian Kinerja SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini, yang merupakan realisasi anggaran dan persentasi capaian Tahun 2017. dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.209.977.550	1.141.094.400	94,31
	Penyediaan jasa surat menyurat	8.050.000	8.048.450	99,98
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	230.065.800	219.689.300	95,49
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas-operasional	133.020.000	95.265.700	71,62
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	109.988.000	109.104.000	99,20
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	9.375.000	9.373.100	99,98
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.500.000	6.500.000	100

	Penyediaan alat tulis kantor	22.000.000	22.000.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.300.000	15.014.600	55,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.500.000	7.423.500	98,98
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.592.000	7.547.000	99,41
	Penyediaan makanan dan minuman	17.000.000	16.781.200	98,71
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	220.869.750	220.100.000	99,65
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	30.000.000	29.970.000	99,90
	Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran	380.717.000	374.277.550	98,31
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	23.750.000	13.310.000	56,04
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	23.750.000	13.310.000	56,40
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	47.998.750	46.748.750	97,40
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	47.998.750	46.748.750	97,40
4	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	255.872.500	252.501.000	98,70
	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	255.872.500	252.501.000	98,70
5	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	153.386.000	130.076.200	84,80

	Penyusun informasi bursa tenaga kerja	103.386.000	98.626.200	95,40
	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	50.000.000	31.450.000	62,90
6	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	746.563.000	731.196.167	97,94
	Pendataan Penyuluhan, Pembentukan, Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Sarana Hubungan Industrial	287.106.000	276.327.100	96,25
	Penyuluhan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	191.001.000	188.516.080	98,70
	Peningkatan Fungsi-fungsi Lembaga Ketenagakerjaan dan syarat-syarat kerja	264.456.000	266.352.987	99,22
Jumlah		2.437.502.800	2.314.926.517	94,97

Dan untuk Pencapaian Kinerja OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel berikut ini, yang merupakan capaian Tahun 2017. dengan rincian sebagai berikut:

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persenta si
1	2	3	4	5	6	7
1	Surat Menyurat Kantor	Jumlah Surat yang bermaterai dan yang berperangko	Lembar	880	873	100 %
2	Biaya komunikasi, sumberdaya air dan Listrik Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100 %

3	Kendaraan dinas Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas yang diservice, ganti suku cadang, Oli dan yang mendapat BBM	Unit	27	20	71 %
4	Pengelola Keuangan	Pengelolaan administrasi keuangan, Perencanaan, Barang	Bulan	12	12	100 %
5	Peralatan Kebersihan Kantor	Jumlah kantor yang dibersihkan	Unit	2	2	100 %
6	Perawatan Peralatan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jenis/ Unit	11	11	100 %
7	Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	jenis	20	20	100 %
8	Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang diadakan	jenis	8	4	55 %
9	Peralatan listrik dan elektronika kantor	Jumlah komponen listrik /penerangan bangunan kantor	Paket	1	1	100 %
10	Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur	Jumlah Bacaan	Paket	3	3	100 %
11	Makan minum aparatur dan tamu dinas	Jumlah makanan dan minuman	kotak	300	290	98 %
12	Rapat dan konsultasi keluar daerah	Jumlah orang yang mengikuti Rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Orang	35	35	100 %
13	Rapat dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam daerah kab. Berau	Orang	55	55	100 %
14	Jasa Administrasi /Tekhnis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi /teknis perkantoran yang tersedia	Orang	12	12	100 %

15	Terawatnya gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di Rawat	Unit	2	2	50 %
16	Laporan capaian Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja keuangan	Laporan	1	1	100%
17	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	3	3	100 %
18	Tersusunnya Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah Kegiatan	Laporan	12	12	100 %
19	Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	2	1	60 %
20	Terlaksananya Pendataan, Penyuluhan, Pembentukan, Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Sarana Hubungan Industrial	Jumlah Kegiatan	Perusahaan	50	50	100 %
21	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Kegiatan	Perusahaan	50	50	100 %
22	Terjadinya Peningkatan fungsi-fungsi Lembaga ketenagakerjaan dan syarat-syarat kerja	Jumlah Kegiatan	Perusahaan	50	50	100 %
Jumlah Rata Persentase Capaian OPD						94.97 %

B. PENJELASAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pencapaian Kinerja OPD dan realisasi anggaran serta presentasi pencapaian kinerja Tahun 2017 akan dirincikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan suatu perangkat yang berfungsi untuk membantu menangani masalah perkantoran serta melayani, mengarahkan dan mengatur semua kegiatan. Jumlah total dana Rp. 1.209.977.550,- dimana jumlah total realisasi sebesar Rp. 1.141.094.400,- dan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,31 %.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan operasional kantor agar kinerja aparatur dapat ditingkatkan. Jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp. 23.750.000,- dan jumlah realisasinya sebesar Rp. 13.310.000,- yaitu 56,04 %.
3. Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan jumlah dana yang dianggarkan Rp. 47.998.750,- dan jumlah yang terealisasi sebesar Rp. 46.748.750,- persentasenya sebesar Rp. 97,40%. Tujuan program ini adalah sebagai pendukung penyediaan laporan dan penyusunan dokumen keuangan.
4. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja merupakan program yang ditujukan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia agar memiliki pengalaman yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Pada program ini jumlah dana yang dimiliki sebesar Rp. 255.872.500,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 252.501.000,- yaitu sebesar 98.70 %.
5. Program Peningkatan kesempatan kerja merupakan upaya peningkatan kesempatan kerja yang akan memberikan dampak positif serta menggambarkan adanya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja. Jumlah dana sebesar Rp. 153.386.000,- terserap sebesar Rp. 130.076.200,- atau 84.80%.
6. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan yaitu program yang mencakup kegiatan pendataan penyuluhan, pembentukan pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan sarana hubungan industrial,

penyuluhan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan peningkatan fungsi-fungsi lembaga ketenagakerjaan dan syarat-syarat kerja. Dana yang di anggarkan sebesar Rp. 746.563.000,- terserap sebesar Rp. 731.196.167,- yaitu 97.94%.

**REALISASI KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016 DAN 2017**

No	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU DPA 2016 (Rp)		REALISASI 2016			PAGU DPA 2017 (Rp)		REALISASI 2017		
		AWAL	DPPA	KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (BOBOT TERTI MBAN G)%	AWAL	DPPA	KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (BOBOT TERTIMBANG)%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	NON PROGRAM	4.844.500.000	4.507.700.000	4.175.288.231	92,63	44,23	4.304.050.000	4.607.650.000	4.219.154.979	91,57	59,89
B	Belanja Langsung	5.193.332.700	4.931.663.220	4.748.677.876	96,29	50,31	2.046.953.000	2.437.502.800	2.315.231.117	94,98	32,86
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.134.705.000	1.440.700.526	1.402.048.500	97,32	14,85	994.177.750	1.209.977.550	1.141.399.000	94,33	16,20
	Penyediaan jasa surat menyurat	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100	0,04	2.500.000	8.050.000	8.048.450	99,98	0,11
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	195.000.000	174.000.000	160.397.350	92,18	1,70	169.000.000	230.065.800	219.689.300	95,49	3,12
	Penyediaan jasa	100.000.000	106.986.754	100.302.000	93,75	1,06	107.500.000	133.020.000	95.265.700	71,62	1,35

pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional	124.955.000	188.340.000	188.340.000	100	2	107.288.000	109.988.000	109.104.000	99,20	1,55
Penyediaan jasa administrasi keuangan	7.500.000	9.500.000	9.461.900	99,60	0,10	7.500.000	9.375.000	9.373.100	99,98	0,13
Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.000.000	13.000.000	12.610.000	97	0,13	5.000.000	6.500.000	6.500.000	100	0,09
Penyediaan jasa perbaikan pralatan kerja	20.957.200	24.107.200	23.718.600	98,39	0,25	15.000.000	22.000.000	22.000.000	100	0,31
Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000	12.480.000	12.457.100	99,82	0,13	10.000.000	27.300.000	15.319.200	56,11	0,22
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000	18.000.000	17.156.500	95,31	0,18	5.000.000	7.500.000	7.423.500	98,98	0,11
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor	10.000.000	15.420.000	14.810.000	96,04	0,16	5.000.000	7.592.000	7.547.000	99,41	0,11
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	20.000.000	19.989.450	99,95	0,21	10.000.000	17.000.000	16.781.200	98,71	0,24
Penyediaan Makanan dan Minuman	255.609.900	373.983.672	371.989.500	99,47	3,94	170.869.750	220.869.750	220.100.000	99,65	3,12
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	20.000.000	40.000.000	38.995.000	97,49	0,41	30.000.000	30.000.000	29.970.000	99,90	0,43
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	165.082.900	279.382.900	271.362.100	97,13	2,87	349.520.000	380.717.000	374.277.550	98,31	5,31

Administrasi/Tehnis Perkantoran	182.100.000	162.000.000	156.959.000	96,89	1,66	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor												0,19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	25.000.000	90.000.000	79.559.200	88,40	0,84	19.000.000	23.760.000	13.310.000	56,04	13.310.000	56,04	0,19
Aparatur												
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000	90.000.000	79.559.200	88,40	0,84	19.000.000	23.750.000	13.310.000	56,04	13.310.000	56,04	0,19
Program Peningkatann Pengemabnagan	78.585.000	78.585.000	78.581.800	100	0,83	17.998.750	47.998.750	46.748.750	97,40	46.748.750	97,40	0,66
Sistem Pelaporan												
Capaian Kinerja												
Keuangan												
Penyusunan Dokumen	48.585.000	48.585.000	48.585.000	100	0,51	17.998.750	47.998.750	46.748.750	97,40	46.748.750	97,40	0,66
Perencanaan dan												
Laporan Capaian												
Kinerja SKPD												
Sosialisasi Kinerja	30.000.000	30.000.000	29.996.800	99,99	0,32	-	-	-	-	-	-	-
Program SKPD												
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.499.740.000	1.379.353.220	1.347.155.120	97,67	14,27	205.827.500	255.827.500	252.501.000	98,70	252.501.000	98,70	3,58

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	1.499.740.000	1.379.353.220	1.347.155.120	97,67	14,27	205.827.500	255.827.500	252.501.000	98,70	3,58
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	116.814.000	115.014.000	104.717.050	91,05	1,11	-	-	-	-	-
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	116.814.000	115.014.000	104.717.050	91,05	1,11	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	301.505.000	124.947.500	123.046.800	98,48	1,30	63.386.000	153.386.000	130.076.200	84,80	1,85
Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	145.767.000	110.061.500	108.970.800	99,01	1,15	63.386.000	103.386.000	98.626.200	95,40	1,40
Pengembangan kelembagaan Produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	155.738.000	14.886.000	14.076.000	94,56	0,15	-	50.000.000	31.450.000	62,29	0,45
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan	1.813.146.200	1.572.494.180	1.483.495.610	94,34	15,72	746.563.000	746.563.000	731.196.167	97,94	10,23
Pendataan Penyuluhan, Pembentukan, Pembinaan Lemabaga Ketenagakerjaan dan	224.604.000	174.907.900	174.907.900	100	1,85	287.106.000	287.106.000	276.327.100	96,25	3,92

sarana HI	264.620.000	190.619.320	185.849.270	97,50	1,97	191.001.000	188.516.080	98,70	2,68
Penyuluhan dan Penyelesaian Persilihan Hubungan Industrial	420.782.400	379.381.400	305.802.500	80,61	3,24	286.456.000	266.352.987	99,22	3,78
Peningkatan Fungsi-fungsi Lembaga Ketenagakerjaan dan Syarat-syarat Sosialisasi sebagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	206.549.200	182.580.200	175.295.200	96,01	1,86	-	-	-	-
Peningkatan pengawasan ,perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	203.314.800	165.903.120	163.862.980	98,77	1,74	-	-	-	-
Peningkatan pengawasan,perlindungan dan penegakan hukum terhadap norma kerja	239.270.000	258.042.440	256.807.960	99,52	2,72	-	-	-	-
Peningkatan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan dan penancangan bulan K3	254.005.800	221.059.800	220.969.800	99,96	2,34	-	-	-	-
Program Pengembangan	223.837.500	130.568.796	130.073.796	99,62	1,38	-	-	-	-

Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	73.264.000	59.026.920	58.636.920	99,34	0,62	-	-	-	-	-
Penertiban tanah lahan fasum dan fasos wilayah eks pemukiman transmigrasi	150.573.500	71.541.876	71.436.876	99,85	0,76	-	-	-	-	-
Pembinaan kelompok usaha bersama (KUB) dikawasan ekspemukiman transmigrasi										
JUMLAH	10.037.832.700	9.439.363.22	8.923.966.107		94,54	6.351.003.000	7.045.162.80	6.534.386.096	0	92,75

Program Prioritas OPD dan Realisasi Tahun 2017 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, digunakan formula sebagaimana tabel di bawah. Sumber data dan informasi yang diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau sampai dengan tahun 2017. Data dan informasi selengkapnya sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Berau

No	Program Prioritas (RPJMD)	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		OPD	Realisasi 2017
			2017	2021		
1	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap dan cakupan peserta pelatihan yang difasilitasi bimbingan lanjut (persen)	35,29	65	Disnakertrans	130%
2	Program peningkatan kesempatan kerja	Persentase tenaga kerja lokal yang terserap di pasar kerja (persen)	45	70	Disnakertrans	50,3%
		Persentase pencari kerja yang ditempatkan (persen)	65	80	Disnakertrans	32,3%
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Besarannya UMK (juta rupiah)	2.315.000	3.242.300	Disnakertrans	2.657.537,50
4	Program Pembinaan Pembangunan Kawasan transmigrasi (P2K Tras)	Jumlah petani transmigran (KK)	20	100	Disnakertrans	0

Berdasarkan tabel diatas dapat di uraikan bahwa:

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas pada Program Prioritas RPJMD Kabupaten Berau , Indikator Kinerja (Outcome) persentase tenaga kerja yang terserap dan cakupan peserta pelatihan yang difasilitasi bimbingan lanjut, Target Kinerja pada Tahun 2017 adalah sebesar 35,29 % dan pada Tahun 2021 sebesar 65% dan yang terealisasi pada Tahun 2017 adalah sebesar 130%.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pelatihan Operator Komputer yang berjumlah 16 peserta pada tahap 1 dan 10 peseria pada tahap 2.
- b. Pelatihan Menjahit yang berjumlah 20 peserta.

Tabel 1

Peserta Pelatihan Operator Komputer Tahap 1

No.	Nama	Pendidikan	Agama	Alamat
1.	Resi Prahmudi	SMA	Islam	Jl. Durian III
2.	Fenny Setyarini	S1	Islam	Jl. Teratai
3.	Nirmala Indasari	SMA	Islam	Jl. Mangga 2
4.	Annisyah Nur Ilmi	S1	Islam	Jl. H. Abdullah
5.	Dedy Wijaya	SMA	Islam	Jl. P.D Guna
6.	Ade Saputra	SMA	Islam	Jl. Benua Etam
7.	Erni Banne Limbong	PAKET C	Kristen	Jl. Merah Delima
8.	Suwarni	SMK	Islam	Sambaliung
9.	Bagus Sudarmanto	SMK	Islam	Jl. Gatot Subroto
10.	Epan Destian	SMA	Islam	Jl. R.A Kartini
11.	Muh. Amrinal Ayyub	SMA	Islam	Jl. Anggur
12.	Fitrah Rahmadani	SMA	Islam	Jl. Anggrek
13.	Dea Tamara	SMA	Islam	Jl. Mawar
14.	Heri Nurdiyanto	SMK	Islam	Jl. Dr. Murjani 3

15.	Tuty Elfiani	S1	Islam	Jl. Teuku Umar
16.	Nursahid Budi Sanjaya	SMA	Islam	Jl. Anggrek

Sumber : Bidang Pelatihan dan Produktivitas

Tabel 2

Peserta Pelatihan Operator Komputer Tahap 2

No.	Nama	Pendidikan	Agama	Alamat
1.	Mutiara Nur Ramadini	SMA	Islam	Jl. Pulau Kakaban
2.	Iin Nurul Faridatuljanna	MAN	Islam	Inaran Sambaliung
3.	Riza Rahmadi	SMA	Islam	Jl. Jendral Sudirma
4.	Ria Afriani	S1	Islam	Jl. Dermaga
5.	Dian Puspita Sari	SMK	Islam	Jl. Sudirman
6.	Indah Puspita Sari	S1	Islam	Jl. Cempaka
7.	Ali Ma'ruf	D2	Islam	Jl. Andika
8.	Novia Handayani	SMK	Islam	Jl. Gunung Panjang
9.	Endang Priyani	SMK	Kristen	Jl. Merah Delima
10.	Debi Sundari	S1	Islam	Jl. Apt Pranoto

Sumber : Bidang Pelatihan dan Produktivitas

Tabel 3

Peserta Pelatihan Menjahit

No.	Nama	Pendidikan	Agama	Alamat
1.	Awaliah	SMA	Islam	Jl. Durian 3
2.	Martha Rombe	SLTP	Kristen	Jl. Singkuang
3.	Melia Simon	SMP	Kristen	Jl. Singkuang
4.	Sisilia Maa	SMA	Kristen	Jl. Murjani 2
5.	Andi Suryana	SMA	Islam	Jl. Garuda
6.	H. Syamsiah	SLTA	Islam	Jl. Teuku Umar

7.	Kristiani	SMK	Islam	Jl. Kandang muntik
8.	Indra Novianti	SMA	Islam	Jl. Padat Karya
9.	Setiawati	S1	Islam	Jl. Gatot Subroto
10.	Meri Pakolo	SMEA	Kristen	Jl. Pulau Panjang
11.	Natalia Sirappa	SMA	Kristen	Jl. Durian 2
12.	Rice Padidi	SMA	Kristen	Jl. Durian 2
13.	Lolli Marlina	SMA	Kristen	Jl. Mangga 3
14.	Dewi Fatmawati	SMA	Islam	Jl. Durian 3
15.	Siti Adila	SMA	Islam	Jl. Meraang Sebrang
16.	Sace Sambominaga	SD	Kristen	Jl. Merah Delima
17.	Wiwik Suciati	SMA	Islam	Jl. S.T Aminuddin
18.	Linda Kumalasari	PAKET C	Islam	Jl. H. Isa 3
19.	Marwati	SMK	Islam	Jl. Teuku Umar
20.	Herlina Novelia	SMA	Islam	Jl. N.Iswahyudi

Sumber : Bidang Pelatihan dan Produktivitas

2. Program Peningkatan kesempatan kerja pada Program Prioritas RPJMD Kabupaten Berau, Indikator Kinerja (Outcome) persentase tenaga kerja lokal yang terserap dipasar kerja, Target Kinerja pada Tahun 2017 adalah sebesar 45 % dan sampai dengan Tahun 2021 sebesar 70 % dan yang terealisasi pada Tahun 2017 adalah sebesar 50.3%, sedangkan Persentase pencari kerja yang ditempatkan, Target Kinerja pada Tahun 2017 adalah sebesar 65% dan sampai dengan Tahun 2021 adalah sebesar 80 %, sedangkan yang terealisasi pada Tahun 2017 adalah sebesar 32.3%.
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan pada Program Prioritas RPJMD Kabupaten Berau, Indikator Kinerja (Outcome) jumlah besaran UMK atau Upah Minimum Karyawan adalah sebesar Rp. 2.315.000,- dan sampai dengan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 3.242.300,- sedangkan yang terealisasi pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 2.657.537,50.

4. Program Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2K Trans) pada Program RPJMD Kabupaten Berau, Indikator Kinerja (Outcome) Jumlah petani transmigrasi adalah sebanyak 20 orang sampai dengan Tahun 2021 adalah sebanyak 100 orang sedangkan yang terealisasi pada Tahun 2017 masih belum ada, dikarenakan anggaran yang tidak tersedia di Tahun 2017.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 s/d Tahun 2017

No	Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai (%)	
			2016	2017
I	Pelayanan Pelatihan Kerja	1. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi	60 %	130%
		2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60 %	
II	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	40 %	32.3%
III	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50 %	80%
IV	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran Pekerja / Buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif .	50 %	100 %
		(Menurut UU RI tahun 2011 masalah yang berkaitan dengan BPJS antara lain	45 %	
		:	50 %	100 %

		<ul style="list-style-type: none"> - BPJS berwenang menagih pembayaran iuran - Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam kewajibanya) 		-
--	--	--	--	---

REALISASI ANGGARAN

1. Pelatihan kerja :

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan Pendidikan Pelatihan Keterampilan Bagi pencari Kerja dengan jumlah Rp 205.827.500 dan dengan adanya APBD – P menjadi Rp 50.000.000,- oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Drs. Fauzi Aspul.

2. Penempatan Tenaga Kerja :

Program peningkatan kesempatan kerja dengan kegiatan penyusunan informasi tenaga kerja dengan jumlah anggaran Rp 63.386.000 oleh PPTK, Drs. Berin Silalahi,MM dan dengan adanya APBD –P menjadi Rp 50.000.000,- oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rizki Arlini,SE.

3. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial :

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan kegiatan Pendataan , penyuluhan, pembentukan , pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan sarana hubungan HI sebesar Rp 151.631.000 dan dengan adanya APBD – D menjadi Rp 135.475.000,- oleh PPTK, Susanto

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan kegiatan Penyuluhan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebesar Rp146.756.000 dan dengan adanya APBD – P menjadi Rp 44.245.000,- oleh PPTK, Sony Perianda,SH

4. Kepesertaan Jamsostek

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan kegiatan peningkatan fungsi-fungsi lembaga ketenagakerjaan dan

syarat-syarat kerja sebesar Rp 243.456.000 dan dengan adanya APBD – P menjadi Rp 25.000.000,- oleh PPTK, Bekti Wijayanti, ST

Dukungan Personil

1. Pelatihan kerja :

Jumlah personil/pegawai yang terlibat dalam pencapaian pelayanan pelatihan kerja terutama dalam pelaksanaan pelatihan kepanitiaan sebanyak 7 orang terdiri dari 5 orang PNS dan 2 orang PTT

2. Penempatan Tenaga Kerja :

Jumlah personil/pegawai yang terlibat dalam pencapaian pelayanan penempatan tenaga kerja masih belum ada

3. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial :

Jumlah personil yang terlibat dalam Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan kegiatan Pendataan , penyuluhan, pembentukan , pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan sarana hubungan HI sebanyak 3 orang PNS dan

Jumlah personil yang terlibat dalam Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan kegiatan Penyuluhan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebanyak 3 orang PNS

4. Kepesertaan Jamsostek

Jumlah personil yang terlibat dalam pelayanan kepesertaan Jamsostek tidak ada

Permasalahan dan solusi

1. Pelatihan kerja :

a. Uraian Masalah

Dengan Anggaran yang ada, untuk pelayanan pelatihan kerja tidak dapat maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga hanya dapat mengkoordinir kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan berbasis kompetensi, sedangkan untuk pelatihan kewirausahaan tidak dijalankan.

Masih banyak pencari kerja belum/tidak memiliki keterampilan . Dalam melaksanakan pelatihan dalam rangka program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja khususnya pelatihan berbasis kompetensi

maka kerjasama dengan balai latihan kerja dengan mengirim peserta pelatihan ke BLK Samarinda/Balikpapan, sedangkan untuk pelatihan yang dilaksanakan di Kabupaten Berau dengan mendatangkan instruktur. Target atau jumlah peserta disesuaikan dengan kemampuan anggaran

b. Upaya tindak lanjut

Membuat program pelatihan sesuai dengan kebutuhan perusahaan/masyarakat.

2. Penempatan Tenaga Kerja :

a. Uraian Masalah

Sampai saat ini Disnakertrans Kab. Berau belum memiliki pengantar kerja dan petugas antar kerja serta perusahaan belum melaporkan jumlah karyawan yang diterima di perusahaan masing-masing

b. Upaya Tindak lanjut

Mengadakan tenaga klinis pengantar kerja dan petugas antar kerja dan meningkatkan pendidikan dan pelatihan. Akan menghubungi perusahaan agar dapat menyampaika laporan tentang tenaga kerja yang ditempatkan serta mengusulkan jumlah anggaran kegiatan.

3. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial :

a. Uraian Masalah

Berdasarkan peraturan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014, tugas Mediator Hubungan Industrial yaitu 1) Pembinaan Hubungan Industrial; 2) Pengembangan Hubungan Industrial; 3) Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial diluar pengadilan. Mengingat pentingnya peran mediator dalam pembangunan ketenagakerjaan serta dalam upaya mendorong pelaksanaan otonomi daerah kedepan, perlunya pemerintah Kabupaten Berau memberikan dukungan terutama penambahan anggaran bidang hubungan industrial dan mediator. Dalam melaksanakan pembinaan, pencegahan, penanganan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dimana hal ini menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dipandang akan lebih efisien, efektif dan tepat sesuai amanat Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 dan Nomor 2 tahun 2004, serta

menjalankan peraturan bupati Berau Nomor 56 Tahun 2016 tentang susunan dan tata kerja dinas tenaga kerja dan transmigrasi

Tidak adanya anggaran dalam APBD mengenai tunjangan jabatan mediator yang telah diterbitkan Surat Keputusan dari menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya diantaranya memediasi perselisihan mengenai ketenagakerjaan tidak sebanding dengan beban resiko pekerja dan fungsinya sehingga diperlukan realisasi dan penegasan pemerintah Kabupaten Berau terhadap perlunya diberikan tunjangan jabatan mediator dan pengalokasian penganggaran APBD terhadap kegiatan mediator dalam menangani kasus perselisihan di 13 kecamatan yang sebelumnya tidak pernah ada

b. Upaya Tindak lanjut

Di Kabupaten Berau hanya ada 1 orang mediator hubungan industrial yang menangani sekitar 400 perusahaan, yang juga merangkap jabatan sebagai pegawai struktural sehingga untuk mengisi kekurangan mediator perlu melakukan penambahan personil mediator dan diberi tunjangan untuk jabatan tersebut serta diberi alokasi anggaran kegiatan sesuai dengan beban pekerjaan.

c. Usulan tindak lanjut

Dengan karakteristik Kabupaten Berau yaitu lokasi perusahaan jauh dari Ibu kota Kabupaten di 13 Kecamatan sehingga Pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, dan penyelesaian kasus perselisihan yang dilakukan perlu Dana Dekonsentrasi

Diperlukan dukungan dana terhadap pertemuan Asosiasi Mediator Hubungan Industrial se Indonesia yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya yang membahas berbagai kasus-kasus krusial termasuk kasus yang masuk di Pengadilan Hubungan industrial pada pengadilan Negeri hingga kasasi ke Mahkamah Agung

4. Kepesertaan Jamsostek

a. Uraian Masalah

Sebelumnya kegiatan Jamsostek melekat pada bidang pengawasan ketenagakerjaan namun setelah terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak lagi menjadi bagian dari Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, namun pada peraturan Bupati Berau Nomor 56 Tahun 2016 disebutkan mengontrol pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja di perusahaan yang merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi seksi pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau tidak memiliki data yang terkait dengan pelayanan kepesertaan Jamsostek.

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan kegiatan peningkatan fungsi-fungsi lembaga ketenagakerjaan dan syarat-syarat kerja yang ada tidak mengakomodir pelayanan kepesertaan Jamsostek dan kegiatan Jamsostek tidak teranggarkan pada tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

b. Upaya Tindak Lanjut

Untuk Tahun 2018 diusulkan rencana kerja anggaran untuk kegiatan terkait jaminan sosial tenaga kerja

C. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dari 3 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat Berhasil	1
2	Berhasil	1
3	Cukup Berhasil	2
4	Kurang Berhasil	-
	Jumlah	4

Adapun tindak lanjut untuk Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi antara lain :

Membuat program pelatihan sesuai dengan kebutuhan perusahaan/ masyarakat

Mengadakan tenaga klinis pengantar kerja dan petugas antar kerja dan meningkatkan pendidikan dan pelatihan. Akan menghubungi perusahaan agar

dapat menyampaikan laporan tentang tenaga kerja yang ditempatkan serta mengusulkan jumlah anggaran kegiatan

Di Kabupaten Berau hanya ada 1 orang mediator hubungan industrial yang menangani sekitar 400 perusahaan, yang juga merangkap jabatan sebagai pegawai struktural sehingga untuk mengisi kekurangan mediator perlu melakukan penambahan personil mediator dan diberi tunjangan untuk jabatan tersebut serta diberi alokasi anggaran kegiatan sesuai dengan beban pekerjaan.

Untuk Tahun 2018 diusulkan rencana kerja anggaran untuk kegiatan terkait jaminan sosial tenaga kerja.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Penyusunan LAKIP Tahun 2017 ini masih belum sepenuhnya sempurna, hal ini tercermin dari Kondisi sebagai berikut :

1. Beberapa Indikator baik input, proses, output maupun benefit masih belum mempunyai Standar Baku. Untuk selanjutnya standar ini perlu disempurnakan untuk setiap tahunnya oleh Bagian Ortal Setda Kabupaten Berau, kemudian disosialisasikan ke SKPD-SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Berau untuk mengikutinya :
2. Belum ada Benchhmarking yang jelas untuk kegiatan – kegiatan yang bisa di bandingkan dengan Instansi sejenis di Pemerintah Kabupaten Berau. Hal ini akan terbaiki di masa-masa yang akan datang dengan cara study banding dengan instansi Pemerintah lain yang sejenis, sehingga menghasilkan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan;
3. Beberapa Elemen Indikator masih dalam bentuk Prosentase dan 1 (satu) tahun, sehingga belum begitu akurat hasil pengukurannya. Untuk Tahun depan direncanakan menggunakan perhitungan-perhitungan dengan cara perhitungan tersebut diperoleh dari Bagian Ortal Setda Kabupaten Berau yang disosialisasikan dengan SKPD-SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau;
4. Beberapa Elemen Indikator Input seperti SDM, Sarana dan Prasarana masih belum terinci dengan jelas, sehingga masih belum informatif bagi yang membacanya. Untuk yang akan datang hal ini hendaknya dijadikan perhatian;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau ini diharapkan dapat memacu Pelaksanaan CLEAN GOVERNMENT dalam rangka mewujudkan GOOD GOVERNMENT, sehingga kedepan akan terwujud sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan atau Akuntabel secara transparansi, kemudian menjadi umpan balik bagi Stake Holder.

Akhirnya berkat kerja keras serta dukungan penuh oleh Bidang-bidang dan terlebih lagi dukungan Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) terhadap Subbagian Penyusunan Program, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau ini dapat disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai bentuk Transparansi terhadap masyarakat. Terima Kasih.

Tanjung Redeb, 4 Maret 2018
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Berau,

